

## **Peran Diplomasi Halal dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Biru Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah**

---

### **Abstract**

Penelitian ini mempunyai tujuan khusus untuk menganalisis strategi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan berdasarkan perannya sebagai negara kekuatan menengah. penulis menggunakan kerangka teoritis identitas kekuatan menengah dan diplomasi ceruk untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu dijelaskan dengan menggunakan metode eksplanatif. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Indonesia Strategi pemerintah adalah memprioritaskan pembangunan kelautan berkelanjutan di wilayah laut nasional. kebijakan Dan Juga melakukan ke berkontribusi ke itu dunia berkelanjutan laut perkembangan dengan itu biru ekonomi prinsip. Ini komitmen akan menjadi diwujudkan oleh meningkat kerja sama di dalam itu laut sektor pada itu bilateral, multilateral Dan daerah tingkat. Secara khusus, itu membentuk dari itu realisasi dari ini komitmen adalah itu Indonesia memiliki menjadi itu strategi dari itu Indonesia pemerintah ke menyadari berkelanjutan laut perkembangan adalah ke menjadi itu pemrakarsa pembentukan forum kerjasama (coalition building), menjadi narahubung bagi negara-negara demi kepentingan pembangunan kelautan berkelanjutan (pembangun jembatan), dan untuk menegakkan internasional norma-norma dalam itu sektor kelautan untuk umum Bagus (katalisator).

**Kata Kunci:** Biru Ekonomi; Indonesia; Tengah Kekuatan; Berkelanjutan Laut Perkembangan.

**Corresponding Author:** John Doe

**Publication Date:** Oktober 1, 2025

**Email:** henipratiwi@unja.ac.id

*This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)*

---

### **Pendahuluan**

Biru Ekonomi adalah ditafsirkan sebagai sebuah ide atau model kebijakan yang berorientasi pada menyeimbangkan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut sumber daya sehingga ketersediaannya dapat diperoleh terus menerus. Dari sudut pandang penelitian hubungan internasional hubungan studi, kehadiran ekonomi biru memiliki keselarasan ide dengan perkembangan global ceramah atau umumnya dirujuk ke sebagai itu Berkelanjutan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan judul berkelanjutan perkembangan. Itu kelestarian dari laut ekosistem di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) titik 14 adalah ditafsirkan sebagai itu dasar ide tentang mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki fokus pada mengembangkan itu laut sektor kelautan sektor pengembangan (Hutabarat, Lela, Masni, & Pratiwi, 2024) dan (Surono et al., 2024). Di proses implementasi, Indonesia mengadopsi gagasan ekonomi biru untuk diterapkan sebagai dasar kebijakan kelautan. Adopsi di Indonesia dimulai melalui pidato langsung Presiden Keenam Republik dari Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menekankan langkah Indonesia di Rio 20+ KTT di Brazil yang menyatakan bahwa “Untuk “Indonesia, Ekonomi Biru adalah Batas Akhir Kita.

Itu Rio 20+ Puncak ditegaskan itu topik dari diskusi pada penguatan lingkungan wawasan dalam membawa keluar berkelanjutan perkembangan. Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat bahwa laut merupakan hal yang vital instrumen yang dapat diimplementasikan dengan memusatkan pada itu keseimbangan di antara itu realisasi dari global wacana dan lingkungan pelestarian. Memulai sejak saat ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk dapat menggunakan ekonomi biru sebagai ide dasar untuk memperbaiki laut kondisi pada A domestik Dan skala internasional ( Saefuddin , 2015). Seiring berjalannya waktu, biru ekonomi kebijakan adalah sungguh-sungguh diinternalisasi sebagai A kebijakan model diarahkan pada bangunan itu laut Hal ini dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perekonomian. tahun 2014, dengan itu isi dari itu argumen itu itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjalankan milik mereka otoritas ke membawa keluar laut pengelolaan melalui biru ekonomi kebijakan model (Mulyani, Purnamasari, & Rahmawati, 2019).

Dalam konteks legalitas, ekonomi biru merupakan salah satu prinsip-prinsip dasar dari Indonesia kebijakan kelautan yang diproyeksikan akan memberikan manfaat bagi semua. Hal ini berdasarkan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas air garis, Jadi itu Indonesia memiliki A moral tanggung jawab ke ikut di dalam itu perkembangan dari itu negara. berpartisipasi di dalam itu perkembangan sebagai Sehat sebagai peningkatan dari itu internasional

lingkungan (Krisman & Sinaga, 2020). komitmen Indonesia menuju pembangunan kelautan yang berkelanjutan juga tersirat dalam Visi Indonesia untuk menjadi "Negara Maritim Dunia" Sumbu" selama Presiden Joko Widodo rezim. Presiden Joko Widodo disampaikan Indonesia inisiatif untuk menegaskan dirinya sebagai poros maritim dunia yang akan memiliki banyak positif pengaruh di dalam itu dunia sektor maritim (Yakti & Susanto, 2018). (Ini tadi disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada KTT Asia Timur ke-9, di Nay Pyi Taw: "Oleh karena itu, Sebagai negara maritim, Indonesia harus menegaskan dirinya sebagai Poros Maritim Dunia, sebagai kekuatan antara dua Samudra: Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu posisi sebagai itu Dunia Maritim Sumbu terbuka kesempatan untuk Indonesia ke membangun daerah Dan internasional kerja sama untuk itu kemakmuran dari itumasyarakat (Humas Sekretariat Kabinet)itu Republik Indonesia, 2014)" (Halal, Declare, Pratiwi, & Hutabarat, 2024).

Dimulai dari dasar ini ide, dia bisa jadi dipahami itu Indonesia berkelanjutan laut sektor perkembangan Juga berisi minat di dalam itu ranah internasional. Hal ini disebabkan oleh kondisi dimana berdasarkan target SDGs poin 14 Indonesia harus mendemonstrasikan -nya komitmen ke berkelanjutan pengembangan kelautan. Selain itu, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, arah Indonesia berkelanjutan laut sektor perkembangan termasuk A luar negeri kebijakan orientasi ke memiliki A positif pengaruh pada itu maritim aspek dari itu dunia. Karena itu, Indonesia kebutuhan ke memainkannya peran di dalam itu bidang politik luar negeri dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan pembangunan kelautan secara keseluruhan. Dalam konteks luar negeri kebijakan, Indonesia Bisa menjadi rahasia sebagai A tengah kekuatan negara. Itu klaim berbasis pada A pernyataan terkirim secara langsung oleh itu Indonesia Kementerian Luar Negeri. yang terkandung dalam itu "Draf Strategis dari Kementerian dari Luar negeri Urusan Tahun 2015-2019". Di dalam ini draf, dia adalah tertulis bahwa Indonesia memproyeksikan dirinya secara konsisten memainkan perannya sebagai negara kekuatan menengah dalam aspek dari luar negeri kebijakan. Di dalam umum, ini adalah Selesai oleh meningkat Indonesia keterlibatan pada itu tingkat internasional melalui kerjasama bilateral dengan strategis mitra negara-negara Dan internasional organisasi-organisasi agar Indonesia dapat memberikan pengaruh menurut ke kemampuan daya menengah (Saputra et al., 2024)h.

Melalui rangkaian pembahasan diatas dapat disimpulkan menyimpulkan itu itu Indonesia pemerintah memiliki A fokus pada pembangunan sektor kelautan berkelanjutan di sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) target dengan mengadopsi gagasan ekonomi biru sebagai dasar kebijakannya. pidato narasi dari Tn. Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo telah memberi isyarat bahwa Indonesia pembangunan maritim berkelanjutan juga diarahkan untuk menjadi orientasi kebijakan luar negeri. Penelitian ini membayar Perhatian ke itu hubungan di antara Indonesia luar negeri kebijakan orientasi sebagai A dunia poros maritim dan peran Indonesia sebagai kekuatan menegahterpengaruh oleh itu pemuahan dari itu biru ekonomi. Karena itu, ini riset adalah tertarik di dalam menganalisis Peran Indonesia sebagai kekuatan menengah dalam konteks menyadari berkelanjutan laut perkembangan (Pratiwi, Hutabarat, Nabila, Hevinosa, & Mauli, 2024a).

Di dalam ini riset, itu pengarang kegunaan beberapa sebelumnya literatur sebagai itu dasar untuk itu argumen ke menjadi disajikan. Itu pengarang memiliki dikategorikan beberapa tinjauan pustaka sebelumnya sesuai dengan permasalahan diangkat dalam penelitian ini. Kelompok pertama adalah tinjauan sebelumnya literatur pada berkelanjutan laut perkembangan, termasuk: (1) pengarusutamaan laut kebijakan; (2) mendesain ulang ekonomi kelautan Indonesia pengembangan; (3) mendefinisikan itu biru ekonomi. Kemudian itu Kedua kelompok berisi A tinjauan dari sebelumnya literatur pada Indonesia sebagai A tengah kekuatan, termasuk: (4) itu tengah kekuatan momen; (5) Indonesia peran sebagai kekuatan menengah; (6) arah baru ekonomi Indonesia luar negeri kebijakan (Bappenas, 2014).

Melalui beberapa deskripsi dari sebelumnya riset di atas, dia Bisa menjadi menyimpulkan itu lingkungan peningkatan melalui berkelanjutan laut pembangunan adalah titik fokus dari internasional masyarakat. Melalui ini masalah, itu biruekonomi adalah dipertimbangkan mampu dari makhluk sebuah solusi inovatif dalam mewujudkan kepentingan Indonesia di dalam itu domestik Dan internasional bola-bola. Di dalam itu cakupan dari itu diskusi dari luar negeri kebijakan, itu kesamaan dari ide-ide berbohong di dalam itu klasifikasi dari Indonesia sebagai negara kekuatan menengah dalam praktiknya kebijakan luar negerinya. Namun, ada sesuatu yang membuatA perbedaan di dalam ini belajar adalah itu penyelidikan dari Langkah Indonesia untuk menjadikan ekonomi biru sebagai basisnya dari -nya luar negeri kebijakan fokus pada berkelanjutan laut sektor perkembangan (Saputra et al., 2024) dan (Saputra et al., 2024).

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif. dengan analisis kualitatif. Pendekatan ini digunakan agar bahwa penulis mampu memberikan pembaca suatu pemahaman tentang strategi kebijakan luar negeri Indonesia di sektor kelautan secara rinci dan komprehensif dalam konsentrasi pembangunan kelautan berkelanjutan berdasarkan pada itu *biru ekonomi*. Ini memerlukan sebuah penjelasan penjelasan tentang hubungan antara beberapa variabel yang terdapat dalam analyzer sehingga dapat menjelaskan strategi Indonesia sebagai *kekuatan menengah*. Teknik

pengumpulan data digunakan dalam makalah ini adalah metode studi literatur. Studi literatur adalah diadakan oleh meninjau jurnal, dokumen, laporan, Dan lainnya ilmiah tulisan-tulisan. Itu data Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer data Dan sekunder data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik dari Indonesia (KKP-RI) terkait ke itu operasionalisasi *biru ekonomi*, dokumen Kementerian Koordinator Bidang Kemaritimanitu Republik dari Indonesia (KKBK-RI) terkait ke Indonesia dan juga buku-buku yang berisi pembahasannya tentang itu belajar dari itu *biru ekonomi*. hubungan Internasional. Sementara itu, data sekunder seperti sebagai jurnal, artikel, Dan berita adalah digunakan ke memperoleh informasi pada itu tema dari Indonesia luar negeri kebijakan, Indonesia laut kebijakan, *biru ekonomi*, dan lain-lain. Penggunaan data sekunder adalah tetap terpilih oleh itu pengarang dengan resmi literatur standar. Jadi itu itu kombinasi dari itu menggunakan dari utama Dan sekunder data membantu itu pengarang ke menyelesaikan penelitian kebutuhan.

## Hasil Dan Pembahasan

Orientasi Kebijakan Kelautan Indonesia: Berkelanjutan Ocean Development Indonesia merupakan salah satu dari 193 negara-negara yang sepakat untuk menerapkan SDGs di tahun 2015 Ini cara itu Indonesia punya tanggung jawab ke mewujudkan tujuan SDGs yang mana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) termasuk itu perkembangan dari Asektor kelautan berkelanjutan global. Kelautan berkelanjutan pembangunan yang tertulis dalam tujuan keempat belas menekankan bahwa para aktor yang terlibat mampu mengelola sektor kelautan dengan melakukan refleksi terhadap alami ekosistem. Ini mengacu pada ke pembatasan tindakan eksploitatif dan juga menegakkan hukum yang berlaku peraturan. Sehingga dengan adanya aplikasi ini, ketersediaan sumber daya kelautan akan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan (Pratiwi, Hutabarat, Nabila, Hevinosa, & Mauli, 2024b).

Setelah itu Rio 20+ Puncak, Indonesia memiliki sebuah orientasi di dalam melakukan berkelanjutan laut perkembangan ditandai oleh itu adopsi dari itu *biru ekonomi*. Berdasarkan tinjauan kelautan kebijakan, Presiden SBY dan Joko Widodo memiliki memiliki fokus pada berkelanjutan laut perkembangan. Presiden SBY secara komprehensif diproyeksikan berkelanjutan laut perkembangan di dalam itu Tahun 2005-2025 Nasional Jangka panjang Perkembangan Rencana (RPJPN) (Ismail & Kartika, 2019). UU Nomor 17 Tahun 2007 menyiratkan hal tersebut informasi itu itu Nasional Jangka panjang Perkembangan Rencana Tanggal 2005-2025 adalah diimplementasikan melalui beberapa tahapan ditelepon itu Jangka Menengah Perkembangan Rencana (RPJM). Tahapan RPJM adalah dilaksanakan dalam jangka waktu setiap lima tahun dengan yakin sasaran dan tujuan pada setiap panggung (Hutabarat et al., 2023).

Merujuk pada RPJPN dan RPJM yang telah siap selama Presiden SBY's administrasi, Presiden Joko Widodo diluncurkan itu "Indonesia Laut Kebijakan Penglihatan "Tahun 2030" sebagai satu dari itu implementasi dari itu Nasional Jangka panjang Rencana Pembangunan 2005-2025 dalam konteks pembangunan berkelanjutan pengembangan sektor kelautan. Sesuai dengan jangka waktu, itu pembentukan badan hukum dasar untuk itu penglihatan dari kelautan Indonesia kebijakan yang adalah yang terbaru adalah tepat di itu Nasional RPJM panggung AKU AKU AKU (Meja 1), yaitu Presidensial Peraturan TIDAK. Tanggal 16/2017. Itu sama berlaku ke itu nilai-nilai ke menjaditerwujud, Indonesia memprioritaskan itu perkembangan dari itu laut sektor di dalam memesan ke menjadi sebuah canggih Dan mandirimaritim negara Dan memanfaatkan -nya kemampuan ke menyumbang ke umum minat keduanya pada A nasional dan internasional skala (Yusdi Andra, Denny Denmar, 2020).

Secara khusus, itu peraturan memiliki itu arah dari laut perkembangan terkandung di dalam tujuh kebijakan pilar-pilar, meliputi: (1) pengelolaan sumber daya laut Dan manusia sumber perkembangan; (2) pertahanan, keamanan, hukum pelaksanaan Dan keamanan pada laut; (3) laut tata kelola Dan lembaga; (4) laut ekonomi Dan infrastruktur Dan kesejahteraan peningkatan; (5) laut ruang angkasa pengelolaan Dan laut lingkungan perlindungan; (6) maritim budaya; (7) maritim diplomasi (Presiden Peraturan No. 16/2017). Beberapa pilar hukum kelautan kebijakan adalah Kemudian diimplementasikan dengan tiga dasar prinsip-prinsip agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan kepentingan nasional. tiga prinsip tersebut adalah wawasan nusantara, berkelanjutan perkembangan Dan ekonomi biru (Masni, Zahar, Hutabarat, Pratiwi, & Tara, 2024).

Kepulauan wawasan cara itu perkembangan pedoman harus menyelaraskan milik mereka minat di dalam sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 agar terwujudnya pembangunan yang sejalan dengan itu dasar ide-ide dari itu negara. Itu prinsip dari pembangunan berkelanjutan berarti orientasi dari pembangunan yang dilakukan harus mampu memenuhi jangka panjang kebutuhan. Karena itu, pemanfaatan upaya adalah tidak diperbolehkan melebihi kemampuan regenerasi ketersediaan sumber daya. Langkah ini dapat dipenuhi melalui ramah lingkungan ramah Dan inovatif pendekatan seperti prinsip kebijakan maritim terakhir, ekonomi biru. Prinsip ekonomi biru Indonesia laut kebijakan adalah ditafsirkan sebagai sebuah pendekatan pemanfaatan sumber daya laut yang menyeimbangkan

pemanfaatan Dan lingkungan konservasi. Itu pelestarian yang dimaksud dalam konteks ini adalah mengurangi eksploitasi berlebihan, memperbarui sumber daya itu memiliki pernah dimanfaatkan, dan juga menjaga kestabilan sumber daya kehidupan sesuai dengan ekosistem laut sehingga dapat menjadi dimanfaatkan di dalam yang panjang istilah. Indonesia Identitas sebagai *A Tengah Kekuatan* Dan Luar negeri Kebijakan Implementasi Indonesia Bisa menjadi rahasia sebagai *A* membentuk dari *tengah kekuatan* negara. Ini Bisa menjadi terlihat melalui itu Kementerian dari Luar negeri Urusan Strategis Rencana Tahun 2015- 2019 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara menengah kekuatan (Pratiwi & Hutabarat, 2024).

Indonesia akan terus secara konsisten memainkan peran *di tengahkekuatan* peran di dalam -nya luar negeri kebijakan kegiatan. Beberapa sebelumnya literatur Juga membuktikan itu berdasarkan pada -nya luar negeri jalur kebijakan rekor, Indonesia mencerminkan itu perilaku dari *A tengah kekuatan* negara. Nur Luthfi Hidayatullah berpendapat bahwa berdasarkan penelaahan masing-masing pemerintah rezim, Indonesia menunjukkan itu perilaku dari *A tengah kekuatan* negara ( Hidayatullah , (tahun 2014). Indonesia memiliki secara konsisten didistribusikan -nya tengah kekuatan sebagai sebuah *perakit* Dan *pembela* Keduanya perilaku adalah terlihat di dalam itu rezim dari Soekarno, Soeharto , Dan Susilo Bambang Yudhoyono (R. Rosmiati, Sembiring, Rahim, Pudjaningsih, & Hutabarat, 2022).

Menurut ke Benson & Lee, itu *tengah kekuatan* Klasifikasi Indonesia dapat dilihat dari beberapa fenomena itu terjadi. Pertama, Indonesia luar negeri kegiatan kebijakan selama masa transisi Orde Baru tampak lebih 'sensitif' terhadap dinamika dari sistem internasional. Benson & Lee mengungkapkan bahwa cuplikan peristiwa seperti terlibat dalam pembentukan dari itu ASEAN keamanan masyarakat ke keterlibatan dalam beberapa forum multilateral menunjukkan bahwa Indonesia mampu memainkan perannya sebagai penghubung orang untuk kepentingan antara hubungan internasional aktor (Benson & Lee, (tahun 2015). Jadi itu bisa jadi sepakat itu di dalam memesan ke melaksanakan luar negeri kebijakan atau mendistribusikan -nya kekuatan, Indonesia akan menunjukkan *tengah* kemampuan daya. Visi kelautan Indonesia kebijakan pada pemerintahan saat ini, yaitu era Presiden Joko Widodo, mengisyaratkan pesan itu itu laut sektor adalah sebuah obyek itu akan menjadi dioptimalkan untuk kepentingan negara. Merujuk padaitu dasar dari -nya laut kebijakan, Indonesia memiliki itu ambisi ke menjadi *A* maritim negara itu adalah berdaulat, mandiri, maju, dan mampu membuat *A* positif kontribusi ke itu internasional masyarakat di sektor kelautan. Merujuk pada Joko Pidato Widodo pada KTT Asia Timur ke-9, Pemerintah Indonesia juga menyampaikan misinya dalam berkontribusi ke global laut perkembangan. Itu pidato menyatakan itu Indonesia akan meningkatkan lautkerja sama pada bilateral, multilateral Dan daerah tingkat (Annisa Sepriani, 2015).

Wacana Peningkatan Peran Internasional Indonesiakkerjasama di sektor kelautan dapat direpresentasikan sesuai dengan karakteristiknya sebagai *kekuatan menengah* negara. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, itu perilaku karakteristik dari *tengah kekuatan* negara-negara sedang *membangun koalisi*, *membangun jembatan* , dan *katalis* . Sebagai sebuah koalisi *yang sedang dibangun* , Indonesia dapat membentuk sebuah koalisi yang melibatkan negara-negara dengan orientasi untuk meningkatkan pengelolaan sektor kelautan. Itu pembentukan dari itu koalisi akan membantu Indonesia menyadari berkelanjutan laut pembangunan melalui upaya kolektif. Sebagai *jembatan pembangun* , Indonesia adalah ditugaskan dengan makhluk *A* kontakorang untuk kepentingan antara *negara-negara besar* dan *kekuatan kecil* dalam proses pembangunan kelautan berkelanjutan pembangunan. Dengan begitu, Indonesia akan mendapatkan citra sebagai *kewarganegaraan internasional yang baik* sesuai dengan itu zat dari itu *tengah kekuatan* di dalam menyadari umum minat ( Alvian dan dkk., (tahun 2017). Sebagai *Akatalisator* , Indonesia adalah ditugaskan dengan menegakkannorma-norma internasional yang terkait dengan aspek kelautan dengan itu tujuan itu itu perkembangan proses telah membawa keluarbersama-sama bisa berjalan seadil-adilnya karena masih pergi tangan di dalam tangan dengan berlaku peraturan. Pembangunan sektor kelautan berkelanjutan di tingkat global Skala dapat diartikan melalui *keberlanjutan global tujuan pembangunan* pada poin 14. Pada poin ini, menekankan bahwa sektor kelautan merupakan sektor yang penting elemen untuk itu hidup kebutuhan dari itu global masyarakat. Namun, di bawah saat ini kondisi masih banyak krisis kesehatan ekologi di sektor kelautan akibat polusi, eksploitasi, dan jugapencemaran lingkungan yang mengancam ketersediaan sumber daya alam di dalam itu masa depan.

Karena itu, sesuai Dan luas pengelolaan dari itu laut sektor adalah satu dari itu perkembangan tantangan menuju masa depan yang berkelanjutan. Merujuk pada urgensi ini, dapat dipahami bahwa Indonesia minat dalam aspek internasional adalah untuk berpartisipasi dalam pertemuan global tantangan tentang berkelanjutan pengembangan sektor kelautan melalui kebijakan kelautannya prinsip-prinsip. Sehingga dengan upaya-upaya tersebut Indonesia dapat menunjukkan kontribusi positifnya terhadap kelautan global sektor (Masni & Hutabarat, 2021) dan (Masni, Rahima, & Hutabarat, 2021).

Indonesia sebagai Pembentukan Koalisi Pembentukan Koalisi di dalam itu konteks dari tengah kekuatan perilaku memiliki itu konotasi dari tidak resmi koalisi pembentukan. Ini cara itu itu koalisi terbentuk adalah

sukarela, bukan mengikat, dan juga tidak berdasarkan pakta. Koalisi Pembentukan yang dimaksud hanya berdasarkan pada keselarasan prinsip dan ide oleh para anggotanya dalam memecahkan masalah *internasional*. Strategi yang digunakan oleh *negara-negara yang memiliki kekuatan* dalam pembentukan koalisi adalah untuk mengumpulkan itu kekuatan dari *Besar kekuatan Dan kecil kekuatan* negara-negara di dalam memecahkan internasional masalah. Itu cara, realisasi kepentingan *kekuatan menengah negara* dapat dicapai melalui usaha kolektif. Sesuai dengan kemampuannya sebagai *kekuatan menengah negara*, Indonesia telah membentuk beberapa koalisi di bentuk forum internasional yang mendukung kelautan pembangunan berkelanjutan dengan prinsip *ekonomi biru*. Beberapa ini forum adalah CTI-CFF Dan AIS Forum. *Itu pembentukan Inisiatif Terumbu Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan Dan Makanan Keamanan (CTI-CFF)* Di dalam tahun 2006, Indonesia adalah menghadapi dengan lumayan menggelisahkan air kondisi. Hal ini disebabkan oleh tersedianya *karang terumbu karang* sebagai sebuah penting elemen dari laut kesehatan ekosistem yang terancam punah (Z. S. H. Rosmiati, 2016).

Pada itu internasional tingkat, A serupa krisis adalah Juga ditemukandi segitiga karang. Segitiga Karang adalah wilayah laut dan pesisir di sekitar Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang memiliki kelimpahan tertinggi kehidupan laut di dunia. Segitiga karang meliputi itu perairan dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini Guinea, Kepulauan Solomon Solomon dan TimorLeste. Kawasan segitiga karang diduga mengalami kerusakan biota terumbu karang hingga 85% dengan 45% nilai mengalami kerusakan parah (Fitriandita, 2018). Kurangnya ketersediaan terumbu karang terumbu karang yang kualitasnya baik tentu akan menjadi ancaman bagi kesehatan ekosistem perairan Indonesia dan negara-negara di dalam segitiga karang (Harbeng Masni, Zuhri Saputra Hutabarat, Lili Andriani, 2010).

Merujuk pada peristiwa tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pesan tentang urgensi terumbu karang segitiga di Konvensi Keanekaragaman Hayati (COPS-8 (Kandungan CBD) di dalam Brazil. Susilo Bambang Yudhoyono pesan adalah tak terpisahkan dari itu krisis terumbu karang yang mengancam stabilitas ekosistem laut kehidupan. Berikutnya di dalam tahun 2007, Indonesia diselenggarakan itu CT-6 pertemuan yang melibatkan diskusi antara karang segi tiga negara. Itu CT-6 pertemuan adalah Juga hadir oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional Organisasi yang menangani isu lingkungan seperti sebagai Konvensi Internasional, Itu Alam Konservasi, Dan itu Dunia Lebar Dana. Di dalam pendek, ini pertemuan dibahas itu perkembangan Dan pengelolaan terumbu karang yang mengalami krisis. Sampai Akhirnya di dalam tahun 2009 A multilateral kerja sama adalah terbentuk, yaitu Itu Karang Prakarsa pada Karang Terumbu karang, Perikanan Dan Makanan Keamanan (CTI-CFF). Kerja sama ini masih melibatkan negara-negara segitiga karang yaitu Indonesia, Malaysia, itu Filipina, Papua Baru Guinea, Sulaiman Kepulauan Dan Timor Leste. CTI-CFF memiliki sebuah orientasi ke mempertahankan kekayaan laut dan pesisir perairan (Masni et al., 2024).

Lagi secara khusus, itu tujuan untuk mendirikan CTICFF bertujuan untuk mengurangi ancaman terhadap ekosistem laut, pesisir daerah Dan pulau-pulau di dalam itu pesisir segi tiga wilayah. Ini sasaran adalah diwujudkan melalui upaya ke memperbaiki global pemanasan, laut keberlanjutan pengelolaan, perikanan pengelolaan, laut terlindung daerah pengelolaan, Dan sumber konservasi. Peserta CTI-CFF percaya bahwa hal ini langkah ini merupakan tindakan progresif mengingat urgensinya dari laut pengelolaan akan memiliki A penting dampak pada manusia kehidupan. Ini adalah Juga A perwakilan dari para peserta untuk dapat mewujudkan global tantangan bertajuk Tujuan Pembangunan Milenium. Indonesia merupakan aktor penting dalam pembentukan Inisiatif Terumbu Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Makanan Keamanan. Secara implisit, itu momentum dari itu Konferensi (Sembiring, Masni, Rahim, Zahar, & Hutabarat, 2024).

Forum Keanekaragaman Hayati (COPS-8) dan CT-6 membuktikan bahwa Indonesia merupakan pemrakarsa berdirinya CTI-CFF. Sebagai simbol kepemimpinannya di CTICFF, Indonesia membangun gedung sekretariat dan CTI Center ke memudahkan itu operasional kegiatan dari ini organisasi. Secara material, Indonesia diinvestasikan 5.5 juta USD untuk mendukung pengembangan kelautan pengelolaan di dalam itu CIT-CFF konservasi daerah (Karang Inisiatif Segitiga, 2021). Pembentukan Negara Kepulauan dan Pulau Forum Negara-Negara Anggota (AIS) didasarkan pada fakta bahwa masyarakat global sedang menghadapi masalah krisis lingkungan (AIS, 2021). Perubahan iklim, bencana alam, polusi laut, keterbatasan sumber daya alam sumber daya adalah A manifestasi dari itu lingkungan krisis yang membahayakan kehidupan masyarakat global secara berkelanjutan cara. Dikhawatirkan krisis lingkungan ini akan berdampak negatif pada masyarakat dan kehidupan ekonomi masyarakat global di masa depan. Merujuk pada urgensi ini, sebuah inisiatif solutif adalah dibutuhkan untuk menjaga lingkungan stabilitas (Rustantono et al., 2024).

Itu Baru York Kota Laut Konferensi adalah sebuah internasional laut konferensi itu melibatkan itu partisipasi dari negara perwakilan, internasional non-pemerintah organisasi, para peneliti, Dan itu ilmiah masyarakat dengan itu orientasi dari berkelanjutan laut sektor perkembangan. Itu Konferensi ini menghasilkan poin ke-14 dari SDGs, yaitu mengandung tujuan pengelolaan laut berkelanjutan, itu subjek dari diskusi. Secara

khusus, itu Baru Konferensi York menekankan bahwa sektor kelautan adalah masa depan keberlanjutan kehidupan global masyarakat Dan kolektif upaya adalah diperlukan ke menjaga ketersediaan alam. New York Konferensi Kelautan menghasilkan komitmen dari peserta ke bersama melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) titik 14 secara sukarela untuk itu keuntungan dari berkelanjutan laut pemanfaatan. Berangkat dari ini komitmen, Indonesia dipegang itu Kepulauan Negara-negara Konferensi di dalam Tahun 2017 dengan itu tujuan dari menyadari mitigasi krisis lingkungan di sektor kelautan untuk kepulauan negara. Itu Pertama Negara dari itu Kepulauan Konferensi adalah hadir oleh 20 delegasi dari pulau negara-negara Dan Asia Pasifik pulau negara. Itu konferensi dipimpin ke sebuah perjanjian di antara Indonesia Dan itu Serikat Bangsa-bangsa Perkembangan Program ke mendirikan A cara dari kerja sama, yaitu itu Kepulauan Dan Pulau Negara bagian Forum (AIS) (Kemenko Kemaritiman, (tahun 2017).

Kemudian pada tanggal 6-8 September 2018 Indonesia menyelenggarakan Konferensi Negara Kepulauan kedua yang dihadiri oleh delegasi dari 46 negara kepulauan. Pertemuan kedua ini konferensi yang berfokus pada kondisi perairan global Dan Juga diuraikan efektif laut perkembangansasaran (Kominfo, (tahun 2018). Berikutnya, pada November 1, Tahun 2018 Indonesia lagi dipegang itu Negara dari itu Kepulauan Konferensi di Manado. Pada kesempatan ini, sejumlah dari 21 pulau negara bagian diratifikasi itu pembentukan dari itu Forum Negara Kepulauan dan Pulau (AIS). Beberapa negara-negara yang sepakat untuk membentuk forum ini adalah itu Serikat Kerajaan, Cabo Hijau, Fiji, Filipina, Guinea Bissau, Indonesia, Jamaika, Jepang, Kuba, Madagaskar, Malta, Papua Baru Guinea, Santo Kitts Dan Angkatan Laut, Sao Jilid Dan Principe, Seychelles, Singapura, Siprus, Suriname, Sri Lanka, Tonga, Dan Timor Leste. Itu pembentukan Negara Kepulauan dan Negara Pulau Forum adalah diproyeksikan ke menjadi sebuah infrastruktur untuk anggota negara-negara di dalam upaya ke mengurangi krisis lingkungan dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang selaras pemangku kepentingan. Jadi itu itu Kepulauan Dan Pulau Forum Negara mampu menghasilkan inovasi solutif untuk menjawab tantangan global yaitu SDGs titik (Adriani et al., 2023).

Pembangun jembatan atau orang yang dapat dihubungi untuk kepentingan oleh tengah kekuatan negara-negara adalah diimplementasikan di dalam dua cara membentuk strategi. Pertama, negara-negara kekuatan menengah akan menjadi normatif menyeimbangkan. Ini cara itu negara-negara kekuatan menengah akan memperkuat kekuatan kecil kekuatan ke keseimbangan itu adanya dari Besar kekuatan. Menyeimbangkan kekuatan melakukan bukan memiliki A kecenderungan konfrontatif, tetapi lebih tepatnya penyesuaian kepentingan di tengah perbedaan sehingga lebih dinamis hubungan muncul. Kedua, tengah kekuatan negara-negara akan menjadi fasilitator bagi negara-negara besar atau kecil kekuatan. Tengah kekuatan negara-negara akan mengakomodasi kepentingan yang ada dalam mendistribusikannya kekuatan di dalam memecahkan internasional masalah. Ini strategi adalah satu dari itu upaya dari tengah kekuatan negara untuk menjadi warga negara internasional yang baik. Indonesia juga telah menunjukkan kemampuannya sebagai penghubung orang untuk kepentingan negara besar dan negara kecil kekuatan di dalam beberapa internasional forum ke menyadari pembangunan kelautan berkelanjutan. Beberapa internasional forum termasuk APEC, IORA, dan AIS Forum. Indonesia kontribusi ke APEC Sebagai forum kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi di kawasan Samudra Pasifik, APEC juga berusaha untuk mempromosikan laut sektor sebagai basis untuk pemanfaatan. Wacana ini muncul di APEC KTT di Bogor pada tahun 1994 atau lebih dikenal dengan Bogor Sasaran pada titik 8 itu: "Tujuan kami adalah untuk mengintensifkan kerja sama pembangunan di antara itu masyarakat dari Asia-Pasifik ekonomi akan memungkinkan kita ke mengembangkan lagi secara efektif itu manusia Dan alami sumber daya dari itu Asia-Pasifik wilayah Jadi sebagai ke meraih berkelanjutan pertumbuhan Dan pembangunan yang adil bagi ekonomi APEC, sementara mengurangi ekonomis kesenjangan di antara mereka, Dan meningkatkan itu ekonomis Dan sosial kesejahteraan dari kita rakyat. Seperti upaya akan Juga memudahkan itu pertumbuhan perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik wilayah" (APEC, 1994).

Berdasarkan wacana tersebut dapat dipahami bahwa APEC menempatkan sumber daya alam dan manusia sebagai dasar untuk mempercepat pertumbuhan kawasan Asia Pasifik ekonomi. APEC memproyeksikan bahwa pembangunan intensif pada itu aspek dari alami sumber daya Dan manusia sumber daya Bisa mendukung berkelanjutan perkembangan. Mengacu pada urgensi tersebut, APEC mendorong gerakan ekonomi sebagai salah satu prioritas kerjasama di tanggal 22 APEC Puncak di dalam Xiamen. APEC anggotasepakat itu dia adalah diperlukan ke menyesuaikan ke global ekonomis tren itu memiliki manifestasi pada pembangunan berkelanjutan (APEC, 2014). Oleh karena itu, itu biru ekonomi mendekati adalah percaya ke menjadi sebuah instrumen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di itu Asia-Pasifik wilayah. APEC berharap para anggotanya dapat bersinergi untuk meningkatkan produktivitas dari itu laut ekonomi ketika menerapkan itu biru ekonomi sebagai sebuah mendekati. Indonesia adalah satu dari itu APEC anggota itu berkontribusi dalam konteks penerapan biru ekonomi. Sebagai wujud implementasi dari itu bekerja prinsip-prinsip dari APEC anggota, Indonesia secara sukarela berpartisipasi aktif dalam beberapa forum untuk pengembangan kebijakan ekonomi biru model seperti

Forum Ekonomi Biru APEC di Tiongkok pada tahun 2012, Konferensi Asia tentang Pangan Laut Keamanan dan Pertumbuhan Biru di Bali pada Tahun 2013, Yang Pertama KTT Ekonomi Biru Pembangunan Pulau Kecil Negara-negara di Abu Dhabi pada tahun 2013, Piala Dunia Biru ke-8 Konferensi Ekonomi di Madrid pada tahun 2013, dan KTT Aksi Laut Global di Den Haag pada tahun 2014 (Rani & Cahyasari, 2015).

Kemudian Indonesia Juga diadopsi itu ide dari biru ekonomi sebagai salah satu asas kelautan nasional kebijakan. Hal ini menjadikan pembangunan kelautan Indonesia selalu perhatikan kondisi laut ekosistem Jadi itu dia Bisa menjadi dimanfaatkan secara berkelanjutan. Akhirnya, Indonesia mendirikan APEC Ocean and Pusat Informasi Perikanan (AOFIC). AOFIC merupakan fasilitas sains dan teknologi yang dibangun Indonesia di Bali. Ini fasilitas Bisa menjadi A cara untuk APEC ke melakukan tinjauan dinamika kelautan di Pasifik Laut wilayah (Global Waktu, (tahun 2013) Memang, itu pembentukan dari AOFIC akan membuat dia lebih mudah untuk APEC anggota ke melaksanakan berkelanjutan lautperkembangan. Indonesia kontribusi ke IORA: Kesepakatan Jakarta dan Rencana Aksi IORA 2017-2021 Asosiasi Negara-Negara Lingkar Samudra Hindia (IORA) dapat digambarkan sebagai organisasi antar pemerintah yang tujuan ke memperkuat daerah kerja sama Dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Samudra Hindia. Sejak -nya pembentukan di dalam tahun 1997, IORA memiliki 23 negara-negara anggota yaitu Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Kenya, Komoro, Madagaskar, Maladewa, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Prancis, Seychelles, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Serikat Uni Emirat Arab, dan Yaman.

IORA memiliki beberapa prioritas untuk kerja sama di dalam pertemuan itu organisasi sasaran, termasuk: (1) maritim keamanan Dan keamanan; (2) berdagang fasilitasi; (3) pengelolaan perikanan; (4) manajemen bencana; (5) kerjasama akademis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (6) kemajuan sektor pariwisata dan budaya (Kementerian Luar Negeri) Urusan, (tahun 2019). Merujuk ke -nya kerja sama prioritas, dapat dipahami bahwa IORA mempunyai tujuan utamafokus pada meningkat ekonomis intensitas Dan berkelanjutan maritim di dalam itu India Laut wilayah. Ini adalah karena Samudera Hindia menyimpan potensi sumber daya laut itu Bisa menyumbang sangat untuk ekonomi pertumbuhan. Indonesia sebagai Katalis Katalis atau juga sering dikenal dengan sebutan norm diffuser adalah direalisasikan oleh negara-negara kekuatan menengah dengan melakukan "positif bujukan" di dalam upaya ke menyelesaikan masalah internasional (Jordan, 2003). Upaya ini terapan oleh membuat persuasif upaya ke lainnyakewenangan untuk mematuhi norma-norma internasional yang telah korelasi dengan inti permasalahan. Langkah ini kebutuhan ke menjadi diambil oleh tengah kekuatan negara-negara di dalam memesan ke menjaga milik mereka legitimasi sebagai mediator di antara Besar kekuatan Dan kecil kekuatan. Sebagai sebuah upaya ke menyadari berkelanjutan laut perkembangan, Indonesia menegakkan itu tahun 1982 UNCLOS norma-norma sebagai Sehat sebagai IPOA-IUU.

Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, Tidak Diatur adalah kejahatan laut masalah itu petunjuk ke kejahatan di dalam itu perikanan sektor. Secara harfiah, liar penangkapan ikan adalah didefinisikan sebagai penangkapan ikan kegiatan di yurisdiksi suatu negara tanpa lisensiprosedur Dan di dalam pelanggaran dari berlaku hukum (Lisnawati, (tahun 2020). Kemudian tidak dilaporkan penangkapan ikan adalah itu pemanfaatan sektor perikanan yang tidak dilaporkan atau tidak dilaporkan dengan benar kepada otoritas yang berwenang, dengan demikian melanggar itu berlaku hukum. Sementara itu, penangkapan ikan yang tidak diatur adalah kegiatan pemanfaatan perikanan telah membawa keluar di dalam air daerah itu Mengerjakan bukan belum memiliki konservasi pengaturan. Tidak diatur penangkapan ikan kegiatan Bisa Juga memimpin ke pidana tindakan itu adalah dilakukan lintas batas negara, terorganisir, dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada kondisi tertentu yurisdiksi perairan.

IPOA-IUU merupakan suatu bentuk kesepakatan antar negara di dunia untuk memberantas *penangkapan ikan IUU*. Dimulai dari kekhawatiran atas maraknya praktik *penangkapan ikan IUU*, kerangka kerja solusi IPOA-IUU dibahas di sebuah pakar konsultasi di dalam Kota Sydney di dalam tahun 2000 (FAO, 2001). Kemudian hasil konsultasi ini menjadi bahan untuk diskusi lebih lanjut pada pertemuan teknis formulasi solusi terhadap praktik *IUU Fishing* di Roma di dalam Februari tahun 2001 Setelah A panjang diskusi proses, di dalam Berbaris tahun 2001 Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) anggota negara-negara sepakat bahwa IPOA-IUU dapat menjadi acuan bagi komunitas internasional untuk mengatasi penangkapan ikan IUU praktik. Secara umum, IPOA-IUU memberikan solusi bagi negara-negara untuk memastikan adanya sanksi terhadap *IUU Pelaku kejahatan perikanan* dapat mencegah dan memberikan efek jera efek, Dan mencegah *Penangkapan Ikan IUU dari terjadi*. efektif dalam menghilangkan praktik *IUU Fishing* dan melakukan bukan menyediakan ekonomis manfaat untuk itu pelaku. Mengacu pada itu pembahasan diatas, dia Bisa menjadi dipahami itu UNCLOS tahun 1982 Dan IPOAIUU adalah internasional norma-norma di dalam upaya ke membasmi IUU Penangkapan ikan. Internasional norma-norma adalah diartikan sebagai seperangkat aturan yang dibentuk berdasarkan perjanjian dari itu anggota (negara) terlibat tentang itu masalah itu adalah terjadi (Martinsson, (tahun 2011). Ini aturan Kemudian menciptakan A tanggung jawab para pemangku kepentingan untuk mematuhi, menegakkan dan melaksanakan itu isi dari itu

diratifikasi perjanjian. Karena itu, jika dikontekstualisasikan di dalam itu proses dari itu pembentukan dari UNCLOS tahun 1982 Dan IPOA-IUU, kedua perjanjian ini dapat divalidasi sebagai suatu bentuk internasional norma.

Indonesia adalah satu dari itu negara-negara itu diratifikasi UNCLOS 1982 dan IPOA-IUU. Sejauh ini, Indonesia telah cukup aktif dalam mengkampanyekan bahaya IUU Penangkapan ikan disertai oleh itu afirmasi dari norma-norma internasional yang berlaku. *Pada* pertemuan ke - 4 dari itu *Diperluas ASEAN Maritim Forum* di dalam Manado, Indonesia menekankan kepada para anggotanya bahwa pentingnya dari pembayaran Perhatian ke *IUU Penangkapan ikan* Karena dia adalah A nyata ancaman ke itu kedaulatan Dankekayaan dari itu negara (Direktur Umum dari Kerja sama dari ASEAN, (tahun 2016). Berdasarkan pada ini urgensi, Indonesia diundang itu peserta ke mengembangkan peraturan khusus sebagai solusi terhadap ancaman tersebut dari *IUU Memancing* (Hutabarat, Masni, Zahar, Pratiwi, & Sembiring, 2024) .

## Kesimpulan

Pemerintah Indonesia berorientasi pada menyadari global berkelanjutan laut pengembangan. Langkah realisasi ini didasarkan pada Indonesia minat di dalam mengoptimalkan nasional laut potensi Dan Juga menunjukkan -nya komitmen untuk berkontribusi pada keberlanjutan global pengembangan sektor kelautan. Sehubungan dengan realisasi dari pengembangan pengembangan , Indonesia memainkan itu peran dari tengah kekuatan. Ini merujuk ke Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Urusan dari itu Republik dari Indonesia, yang negara bagian itu Indonesia akan melanjutkan ke secara konsisten bermain -nya peran sebagai A tengah kekuatan negara di dalam memuaskan luar negeri kebijakan minat. Karena itu, Indonesia kebutuhan ke melaksanakan A diarahkan luar negeri kebijakan strategi ke menyadari laut pembangunan berkelanjutan di dalam sesuai dengan -nya kemampuan dari tengah kekuatan. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia pemerintah strategi adalah ke memprioritaskan berkelanjutan laut perkembangan di dalam nasional laut kebijakan Dan Juga melakukan ke berkontribusi untuk pembangunan kelautan berkelanjutan di dunia dengan itu biru ekonomi prinsip. Ini komitmen akan menjadi diwujudkan oleh meningkat kerja sama di sektor kelautan pada tingkat bilateral, multilateral Dan daerah tingkat. Secara khusus, bentuk realisasi komitmen tersebut adalah bahwa Indonesia telah menjadi pemrakarsa pembentukan forum kerja sama dalam sektor kelautan berkelanjutan, menjadi kontak orang untuk negara-negara di dalam itu minat dari pembangunan kelautan berkelanjutan, dan menjunjung tinggi internasional norma-norma di dalam itu laut sektor untuk saling menguntungkan. Secara keseluruhan, itu hasil dari ini belajar menunjukkan itu Indonesia berkontribusi ke global berkelanjutan laut perkembangan melalui -nya peran sebagai A kekuatan menengah. Hal ini tentu saja memperkuat beberapa dari itu sebelumnya sastra argumen itu menurut ke -nya luar negeri kebijakan melacak catatan, Indonesia memainkan peran sebagai kekuatan menengah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan di antara itu mandiri Dan bergantung variabel dijelaskan melalui itu aplikasi dari teori di dalam ini belajar. Itu hubungan adalah ditampilkan melalui Indonesia peran sebagai kekuatan menengah dipengaruhi oleh Indonesia komitmen di dalam menyadari berkelanjutan laut perkembangan berdasarkan pada itu biru ekonomi, khususnya pada suatu skala internasional.

## Referensi

- Adriani, E., Surono, Y., Budiningtyas, D. P., Maududi, S. Al, Azrianto, A., Fahmi, A., & Hutabarat, Z. S. (2023). Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja Pengaruhnya Terhadap Motivasi Serta Dampaknya Pada Kinerja Pegawai. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(3), 984–994. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i3.3233>
- Annisa Sepriani, Z. S. H. (2015). PERBANDINGAN PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE PAIR CHECKS DAN TIPE MAKE A MATCH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI 8 KOTA JAMBI. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Halal, S., Declare, S., Pratiwi, H., & Hutabarat, Z. S. (2024). *Pengabdian Masyarakat Sumber Daya Unggul Diseminasi Standarisasi Jaminan Produk Halal dalam Memenuhi Kriteria*. 2(1), 26–30. <https://doi.org/10.37985/pmsdu.v2i1.359>
- Harbeng Masni, Zuhri Saputra Hutabarat, Lili Andriani, D. A. (2010). *Pengaruh Kepemimpinan Dan Kompensasi Terhadap Motivasi Berprestasi*. 8(1), 33–50.
- Hutabarat, Z. S., Lela, L., Masni, H., & Pratiwi, H. (2024). *IbM MAHASISWA DALAM PEMBUATAN MEDIA 3D PEMBELAJARAN DALAM PERSIAPAN PRAKTEK MENGAJAR*. *Pengabdian Deli Sumatera*, 3(1), 36–44.
- Hutabarat, Z. S., Masni, H., Zahar, E., Pratiwi, H., & Sembiring, B. (2024). *Analysis of Halal Value Chain Education in Efforts to Develop Halal Tourism Products and Increase Income*. 4(1), 2021–2024.

- Hutabarat, Z. S., Riady, Y., Amral, S., Sumiharti, S., Susanti, H., Saputra, T., ... Taufan, A. (2023). Teaching Practice Program in College of Education – Creativity, Emotional Intelligence and Locus of Control. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 9(1), 244. <https://doi.org/10.33394/jk.v9i1.6416>
- Masni, H., & Hutabarat, Z. S. (2021). *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE , INNOVATION AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES ( ONLINE ) - ISSN : 2717-7130 Learning with Online Learning Methods During the Covid-19 Period and the Psychological Impact for Students*. (October), 295–306.
- Masni, H., Rahima, A., & Hutabarat, Z. S. (2021). Implementasi Penanaman Kesadaran Pentingnya Keterampilan Soft Skills Entrepreneurship Wadah Pengembangan Fkip Unbari. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 9(2), 52–62. <https://doi.org/10.24127/pro.v9i2.4512>
- Masni, H., Zahar, E., Hutabarat, Z. S., Pratiwi, H., & Tara, F. (2024). *Halal Value Chain Education : Economic Improvement Efforts in the Development of Halal Tourism Products*. 4(1), 12–14.
- Mulyani, H., Purnamasari, I., & Rahmawati, F. (2019). Analisis Kesiapan Mengajar Program Pengalaman Lapangan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Melalui Pembelajaran Mikro. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 147–156. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i2.18086>
- Pratiwi, H., & Hutabarat, Z. S. (2024). *Multidisciplinary Sciences and Arts The Future Of Jambi UMKM Marketing Trough The Green Economy In Digital Marketing International Journal of Multidisciplinary Sciences and Arts*. 3(3), 8–12.
- Pratiwi, H., Hutabarat, Z. S., Nabila, R., Hevinosa, A. D., & Mauli, C. (2024a). *Multidisciplinary Sciences and Arts Blue Economic Beacon : Red And White Leads The Way Through Niche Diplomacy International Journal of Multidisciplinary Sciences and Arts*. 3(1), 344–351.
- Pratiwi, H., Hutabarat, Z. S., Nabila, R., Hevinosa, A. D., & Mauli, C. (2024b). *Multidisciplinary Sciences and Arts Blue Economic Beacon : Red And White Leads The Way Through Niche Diplomacy International Journal of Multidisciplinary Sciences and Arts. International Journal of Multidisciplinary Sciences and Arts*, 3(1), 344–351. Retrieved from <https://jurnal.itscience.org/index.php/ijmdsa/article/view/3947/3108>
- Rosmiati, R., Sembiring, B., Rahim, A., Pudjaningsih, W., & Hutabarat, Z. S. (2022). How is the Readiness of Students to Become Teachers in the Industrial Revolution Era 4.0? *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 8(4), 831. <https://doi.org/10.33394/jk.v8i4.6248>
- Rosmiati, Z. S. H. (2016). Pengaruh Praktik Pengalaman Lapangan (Ppl), Minat Menjadi Guru, Dan Prestasi Belajar Terhadap Kesiapan Mahasiswa Menjadi Guru Yang Profesional. *Economic Education Analysis Journal*, 5(1), 100–114. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj/article/view/9989>
- Rustantono, H., Rasyid, H., Nur Cholifah, T., Eka Yanti, Y., Amral, S., Saputra, T., & Saputra Hutabarat, Z. (2024). Exploring the Role of Family Economic Education in Meeting Economic Demands, Sociocultural Dynamics, and Enhancing Economic Literacy. *Jurnal Pendidikan*, 16(2), 1947–1958. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4942>
- Saputra, Z., Sembiring, B., Masni, H., Rahim, A., Zahar, E., Pratiwi, H., ... Belajar, H. (2024). *BELAJAR SISWA : PENGARUHNYA TERHADAP LINGKUNGAN*. 7, 7504–7517.
- Sembiring, B., Masni, H., Rahim, A., Zahar, E., & Hutabarat, Z. S. (2024). *Multidisciplinary Sciences and Arts Analysis of the School Environment , Teacher Communication and Student Learning Motivation on the Influence of Student Learning Outcomes International Journal of Multidisciplinary Sciences and Arts*. 3(3), 61–71.
- Surono, Y., Simarmata, J., Riyadi, Y., Yati, Y., Pratiwi, H., & Hutabarat, Z. S. (2024). Looking at Financial Performance, Analysis of its Effect on Share Prices. *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Arts*, 2(2), 260–265. <https://doi.org/10.47709/ijmdsa.v2i2.3564>
- Yusdi Andra, Denny Denmar, Z. S. H. (2020). *Effect Of Work Motivation On Teachers Of Junior High School Teachers In Muaro Jambi District*. <https://doi.org/10.4108/eai.17-10-2018.2294090>